

Evaluasi Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan PSAP No. 02 di Kantor Camat Langowan Selatan

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 1 2025
Hal. 280-290
DOI: 10.58784/rapi.311

Chelchia Vilia Kolamban

Corresponding author:
chelchiakolamban064@student.unsrat.ac.id
Sam Ratulangi University
Indonesia

Sonny Pangerapan

Sam Ratulangi University
Indonesia

Lidia M. Mawikere

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 23 March 2025
Revised 22 May 2025
Accepted 24 May 2025
Published 26 May 2025

ABSTRACT

Government accounting standards (SAP) set out the rules for preparing and presenting financial reports for all levels of government. Government accounting standards are clearly regulated in Government Regulation Number 71 of 2010. The South Langowan Subdistrict Office has presented a budget realization report. The purpose of this research is to evaluate how financial reports have been prepared based on PSAP No. 02 and Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards. This research uses a descriptive qualitative method with a purposive sampling technique. The results of this research definitively show that budget realisation reports at the South Langowan Head Office have been made in accordance with Government Regulation No. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards PSAP No. 02.

Keywords: evaluation; government accounting standards; statement of budget realization; financial reports
JEL Classification: H83; M41

©2025 Chelchia Vilia Kolamban, Sonny Pangerapan, Lidia M. Mawikere



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, yang bertujuan untuk meningkatkan permintaan masyarakat terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik, telah mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengadopsi metode yang lebih transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab, sangat penting untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang berpegang pada prinsip tepat waktu dan memenuhi standar akuntansi yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab untuk memastikan bahwa suatu organisasi bertanggung jawab atas kinerjanya sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisar, transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasi atas hasilnya serta penyajian laporan. Pencatatan: jurnal, pengikhtisaran: buku besar, penyajian: laporan keuangan ke dalam transaksi dan kejadian keuangan. Pencatatan: jurnal, pengikhtisaran: buku besar, penyajian: laporan keuangan ke dalam transaksi dan kejadian keuangan.

Laporan keuangan suatu kinerja dalam satu periode tertentu untuk memberi informasi mengenai kondisi keuangan dan menjadi alat dalam menganalisis kegiatan pengambilan keputusan pada masa yang akan datang.

Standar Akuntansi Pemerintahan mencakup berbagai pedoman, salah satunya adalah Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 2. Standar ini khusus berkaitan dengan Laporan Realisasi Anggaran, yang bertujuan untuk menetapkan kerangka penyajian laporan realisasi anggaran. Tujuan dari laporan-laporan ini adalah untuk memastikan akuntabilitas sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, serta untuk memberikan informasi mengenai realisasi anggaran dan entitas pelapor yang terlibat. Anggaran dan realisasinya dapat dibandingkan untuk menilai sejauh mana target yang telah disetujui, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang telah tercapai.

Laporan Realisasi Anggaran merupakan dokumen komprehensif yang memberikan informasi mengenai aktualisasi pendapatan, belanja transfer, surplus/defisit pembiayaan, dan sisa pembiayaan anggaran. Laporan ini membandingkan aspek-aspek tersebut di atas dengan anggaran yang dituangkan dalam ketentuan umum peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, khususnya dalam pedoman penyampaian informasi keuangan daerah.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Ini memberikan pendekatan terstruktur untuk mencatat, mengukur, dan melaporkan transaksi dan peristiwa keuangan dengan cara yang konsisten, andal, dan transparan. Kerangka tersebut mencakup konsep dasar, tujuan, dan prinsip-prinsip yang melandasi akuntansi pemerintahan, serta menjadi landasan dalam pengembangannya. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, Kantor

Kecamatan Langowan Selatan sebagai entitas pemerintah wajib menganut sistem keuangan berbasis akrual. Laporan keuangan pemerintah dalam hal ini disusun dan digunakan dalam hal untuk memberikan informasi yang tepat dan relevan mengenai laporan posisi keuangan yang diterapkan dan dilakukan oleh salah satu entitas dalam satu periode pelaporan. Dalam berbagai entitas mempunyai kewajiban yaitu untuk melaporkan setiap usaha yang sudah dilaksanakan dan juga hasil pencapaian selama pelaksanaan kegiatan secara terstruktur dan sistematis dalam suatu periode pelaporan.. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan mencakup serangkaian laporan realisasi anggaran yang memberikan rincian mengenai realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

Sesuai ketentuan yang dituangkan dalam Kebijakan Publik 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah pusat/daerah mencakup berbagai komponen. Komponen-komponen tersebut antara lain Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan keuangan. Dari beberapa kejadian diatas memberikan dugaan adanya kurang sesuaian penyajian laporan realisasi anggaran pada Kantor Camat Langowan Selatan Dengan uraian diatas maka penulis ingin mengevaluasi bagaimana penerapan kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan, penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang di sajikan Kantor Camat Langowan Selatan berdasarkan PSAP Nomor 02 yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif Negara Indonesia

dibawah kabupaten/kota, kecamatan dipimpin oleh Camat dan dipecah dalam beberapa kelurahan dan desa. Dalam hal satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kecamatan memiliki wilayah kerja tertentu yang di pimpin Camat dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dalam pelayanan publik, dan mempertanggungjawabkan kewenangan yang dilimpahkan dengan membuat laporan keuangan. Sehubungan dengan penerapan PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas penyelenggaraan Daerah disebutkan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang memerintahkan untuk memeriksa apakah laporan keuangan SKPD yang terdiri dari atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan serta laporan pemerintah daerah telah disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta tepat waktu.

2. Tinjauan pustaka

Akuntansi pemerintahan

Akuntansi diartikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran terhadap transaksi keuangan yang dilakukan secara sistematis dan kronologis disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut untuk Langkah pengambilan keputusan Purnairawan dan Sastroatmodjo (2021) (2021:1). Sedangkan menurut Sumarsan (2020:1) mengatakan bahwa akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi ini digunakan untuk memberikan gambaran keuangan yang akurat dan relevan kepada para pemangku kepentingan, sehingga mereka

dapat membuat keputusan ekonomi yang tepat (Weygandt et al., 2021).

Akuntansi pemerintah mengacu pada pemanfaatan prinsip dan praktik akuntansi dalam bidang keuangan pemerintah. Hal ini mencakup beberapa aspek, khususnya selama implementasi anggaran, dan mencakup dampak luas yang ditimbulkannya terhadap lembaga pemerintah di semua tingkatan, terlepas dari durasi atau permanennya (Winartuti, 2019:4). Sedangkan menurut Sujarweni (2019:18) akuntansi pemerintah adalah akuntansi yang berhubungan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai pelaksanaan dan pelaporannya, dengan pengaruh yang akan ditimbulkannya.

Akuntansi sektor publik

Akuntansi sektor publik berfungsi sebagai alat informasi penting bagi pemerintah dan masyarakat. Informasi akuntansi memainkan peran penting dalam proses pengendalian manajemen entitas pemerintah, yang mencakup beberapa tahapan seperti perencanaan strategi, pengembangan program, penganggaran, penilaian kinerja, dan pelaporan kinerja. Dalam konteks ini, akuntansi sektor publik terkait erat dengan tiga aspek utama: berfungsi sebagai penyedia informasi, memfasilitasi pengendalian dan akuntabilitas manajemen, dan berfungsi sebagai entitas yang terlibat dalam produksi barang dan jasa publik untuk memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat umum (Mardiasmo, 2018). Sedangkan menurut Siregar (2015:2), akuntansi sektor publik yang mengelola dana masyarakat. Berkaitan dengan tugasnya mengelola dana dalam pengelolaan dana tersebut.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP)

Menurut Hasanah dan Fauzi (2016:17) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya dan keuangan yang dikelola oleh pemerintah

pusat/daerah, dalam suatu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran dapat diartikan sebagai dokumen yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja keuangan aktual suatu organisasi atau badan sehubungan dengan angka yang dianggarkan. LRA merupakan dokumen komprehensif yang memberikan analisis rinci tentang asal usul, distribusi, dan pemanfaatan aset fiskal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Laporan ini menawarkan penilaian komparatif terhadap proyeksi anggaran dan aktualisasinya dalam jangka waktu pelaporan tertentu. Komponen yang tercakup dalam laporan realisasi anggaran mencakup beberapa variabel seperti pendapatan, belanja, transfer, dan keuangan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 mengemukakan bahwa, dalam penyajian laporan realisasi anggaran, terdapat berbagai akuntansi yang disusun antara lain :

- a. Akuntansi Pendapatan-LRA
Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- b. Akuntansi Belanja
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Akuntansi Surplus/Defisit LRA
Selisih antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit LRA. Surplus LRA adalah selisih lebih

antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit LRA adalah selisih kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

- d. Akuntansi pembiayaan
Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam pengeluaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
- e. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privitisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencarian dan Cadangan.
- f. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- g. Akuntansi Pembiayaan Neto
Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan neto.
- h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran

pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode

Kajian penelitian terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu tentang PSAP No. 02 terkait LRA dengan berbagai lingkup penelitian telah dilakukan, diantaranya tentang pengakuan, pencatatan, penyajian dan pelaporan (Panggabea 2025; Rindengan dan Kapojos, 2024)), transparansi dan akuntabilitas (Anggraini et al., 2023), penyajian informasi realisasi, pengidentifikasian, periode pelaporan dan ketepatan waktu penyajian LRA, penyelenggaraan akuntansi anggaran, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan (Kandioh et al., 2023; Nendher, 2022), efektivitas dan penyajian PSAP No. 2 dengan PSAP 02 dalam PP No 71 Tahun 2010 (Boja et al., 2023). Penyajian LRA (Majampoh dan Datu, 2021)

3. Metode riset

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2020) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, ilmu sosial, data, dan tujuan kegunaan, oleh karena itu dipilih metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan kenyataan dan juga keadaan akan suatu objek dalam bentuk uraian kalimat

berdasarkan keterangan dari pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Dalam melakukan analisis deskriptif terhadap data penelitian ini, peneliti melakukan tahapan mengumpulkan data-data jenis kuantitatif yaitu informasi yang berkaitan dengan Laporan Realisasi Anggaran, kemudian mengevaluasi data dan informasi tentang laporan realisasi anggaran, dan melihat bagaimana penerapan PSAP Nomor 02 tentang Laporan realisasi anggaran di Kantor Camat Langowan Selatan selanjutnya menyimpulkan uraian dari penjelasan yang ada. Proses analisis yang akan dilakukan peneliti adalah :

1. Tahap awal yang dilakukan adalah mengumpulkan data mengenai penyajian LRA melalui wawancara maupun dokumentasi.
2. Selanjutnya dari setiap data yang telah didapatkan, dilakukan analisis berupa perbandingan antara prosedur yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Langowan Selatan dengan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAP) No 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dan PP No 71 Tahun 2010.
3. Terakhir, peneliti menyimpulkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terkait Laporan Realisasi Anggaran dan peneliti pun menarik kesimpulan apakah sesuai atau tidak sesuai dan memberikan saran Pada Kantor Camat Langowan Selatan.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Belanja laporan realisasi anggaran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Camat Langowan Selatan laporan realisasi anggaran adalah belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Perjalanan Dinas. Laporan realisasi anggaran Kantor Camat Langowan Selatan tidak menyajikan belanja modal.

Tabel 1. Laporan belanja daerah tahun 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Operasi	Rp1.754.903.298	Rp1.663.111.638
	Belanja Pegawai	Rp1.643.783.000	Rp1.551.991.340
	Belanja Gaji	Rp1.145.168.000	Rp1.059.911.340
	Belanja Tambahan	Rp 498.615.000	Rp. 492.080.000
	Penghasilan ASN		
	Belanja Barang Jasa	Rp 111.120.298	Rp 111.120.298
	Belanja Barang	Rp 20.408.458	Rp 20.408.458
	Belanja Jasa	Rp 83.911.840	Rp 83.911.840
	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 6.800.000	Rp 6.800.000
	Belanja Modal	Rp 9.945.000	Rp 9.945.000
	Belanja Bangunan dan Gedung	Rp 9.945.000	Rp 9.945.000

Sumber: Kantor Camat Langowan Selatan, 2023

Tabel 1 menunjukkan bahwa Laporan belanja operasi Kantor Camat Langowan Selatan tahun 2023. Anggaran yang ada pada Kantor Camat Langowan Selatan Rp1.754.903.298 dan jumlah belanja yang terealisasi pada tahun 2023 berjumlah Rp1.663.111.638 yang bisa dilihat bahwa tidak sepenuhnya jumlah yang dianggarkan terpakai sehingga memiliki selisih Rp91.791.660.

Surplus/defisit

Berdasarkan hasil penelitian yang ada pada Kantor Camat Langowan Selatan tahun 2023 Surplus/Defisit menggambarkan selisih antara pendapatan yang diterima dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

Tabel 2. Laporan surplus/defisit tahun 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
	Surplus/ Defisit	Rp1.754.903.298,00	Rp1.663.111.638,00

Sumber: Kantor Camat Langowan Selatan, 2023

Tabel 2 menunjukkan anggaran pada Kantor Camat Langowan Selatan berjumlah Rp1.754.903.298 yang terealisasi berjumlah Rp1.663.111.638. Hal ini menunjuk bahwa belanja daerah Kantor Camat Langowan Selatan lebih rendah dari anggaran yang disiapkan, hal ini dapat menghasilkan surplus. Surplus terjadi karena anggaran yang dialokasikan ternyata lebih besar daripada pengeluaran yang sebenarnya terjadi. Faktor-faktor

yang bisa menyebabkan realisasi belanja di bawah adalah efisiensi dalam pengelolaan keuangan, penghematan, dalam pengadaan barang dan jasa, atau kurangnya kegiatan yang terealisasi sepenuhnya.

SiLPA/SiKPA

SiLPA/SiKPA dalam LRA pada Kantor Camat Langowan Selatan mengacu pada saldo akhir keuangan yang terjadi saat akhir periode anggaran.

Tabel 3. SiLPA/SiKPA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi
Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berkenaan	Rp1.754.903.298,00	Rp1.663.111.638,00

Sumber: Kantor Camat Langowan Selatan, 2023

Tabel 3 menyatakan bahwa anggaran yang ada di Kantor Camat Langowan Selatan jumlahnya Rp1.754.903.298 dan terealisasi berjumlah Rp1.663.111.638. Belanja daerah yang realisasinya di bawah anggaran mengakibatkan terjadinya SiLPA pada Kantor Camat Langowan Selatan. SiLPA memperlihatkan bahwa pemerintah

daerah sudah berhasil mengelola keuangan dengan efisien.

Pembahasan

Evaluasi penerapan PSAP Nomor 02 PP Nomor 71 Tahun 2010

Berikut adalah perbandingan LRA Kantor Camat Langowan Selatan Tahun 2023 dengan PSAP Nomor 02.

Tabel 3. Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran dengan PSAP Nomor 02

Indikator	PSAP Nomor 02	LRA Kantor Camat Langowan Selatan	Keterangan
Penyajian informasi dalam Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan informasi tentang pelaksanaan pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan, yang dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode	Laporan realisasi anggaran Kantor Camat Langowan Selatan menyajikan informasi realisasi belanja, surplus/defisit. SiLPA/SiKPA	Sesuai
Periode pelaporan	Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun	Laporan realisasi anggaran Kantor Camat Langowan Selatan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun	Sesuai
Ketepatan waktu penyajian	Entitas menyajikan laporan realisasi anggaran selambat lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	Kantor Camat Langowan Selatan menyajikan laporan realisasi anggaran selambat lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	Sesuai
Penyajian pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut : 1. Pendapatan-LRA 2. Belanja 3. Transfer 4. Surplus/defisit-LRA 5. Penerimaan Pembiayaan 6. Pengeluaran Pembiayaan 7. Pembiayaan Neto 8. Sisa Lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Laporan realisasi anggaran Kantor Camat Langowan sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut : 1. Belanja 2. Surplus/defisit 3. SiLPA/SiKPA	Sesuai
Penyelenggaraan akuntansi anggaran	Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran disahkan dan dialokasikan	Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran belanja dan pembiayaan pada saat anggaran disahkan dan dialokasikan	Sesuai

Sumber: Data olahan, 2024

Tabel 3 menunjukkan bahwa bahwa LRA di Kantor Camat Langowan Selatan telah sesuai dengan PSAP Nomor 02. LRA Kantor Camat Langowan Selatan menyajikan informasi belanja, surplus/defisit, SiLPA/SiKPA. Kantor Camat Langowan Selatan tidak memiliki pos belanja modal, pos pendapatan sendiri, tetapi mendapatkan dana dari alokasi pemerintah pusat.

Kantor Camat Langowan Selatan telah menyajikan informasi berupa nama entitas, cakupan entitas laporan, periode yang dicakup, mata uang laporan dan satuan

angka yang digunakan LRA yang ada pada Kantor Camat Langowan Selatan disajikan sekali dalam setahun. Entitas LRA disajikan setiap enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dan untuk akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran sudah disahkan dan dialokasikan.

Evaluasi perbandingan belanja Laporan Realisasi Anggaran

Berikut adalah perbandingan Belanja LRA Kantor Camat Langowan Selatan tahun 2023 dengan PSAP Nomor 02.

Tabel 4. Perbandingan belanja (LRA) Kantor Camat Langowan Selatan dengan PSAP Nomor 02

Indikator	PSAP Nomor 02	LRA Kantor Camat Langowan Selatan	Keterangan
Pengakuan	Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah	Dalam pelaporannya Kantor Camat Langowan Selatan menyertakan apa saja biaya belanja yang ada di dalam pelaporan dan diakui	Sesuai
Pengukuran	Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaann	Pada konteks ini, pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran	Sesuai
Penyajian dan Pengungkapan	PSAP No.02 belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi, PSAP No.02 klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, hibah, bantuan social, dan belanja tak terduga	Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran telah sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Belanja dalam laporan realisasi anggaran Kantor Camat Langowan Selatan yaitu belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan ASN, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas.	Sesuai

Sumber: Data olahan, 2024

Tabel 4 menunjukkan indikator yang ada yakni pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belanja pada

Kantor Camat Langowan Selatan dengan PSAP Nomor 02 yang berlaku. Dalam aspek pengakuan dari Rekening Kas

Umum Negara/Daerah , Adapun dalam pelaporannya Kantor Camat Langowan Selatan mencantumkan apa saja biaya

belanja yang ada di dalam pelaporan dan diakui.

Evaluasi perbandingan surplus/defisit LRA Kantor Camat Langowan Selatan

Tabel 5. Perbandingan surplus/defisit (LRA) Kantor Camat Langowan Selatan dengan PSAP Nomor 02

Indikator	PSAP Nomor 02	LRA Kantor Camat Langowan Selatan	Keterangan
Penyajian	Penyajian selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit	Kantor Camat Langowan Selatan mencatat yang menjadi selisih dalam penyajian laporan realisasi anggaran dalam instansi	Sesuai

Sumber: Data olahan, 2024

Tabel 5 menunjukkan perbandingan surplus/defisit yang ada pada Kantor Camat Langowan Selatan dan PSAP Nomor 02 yang berlaku. Penyajian PSAP Nomor 02 menyajikan selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit dan pada Kantor Camat Langowan Selatan mencatat selisih

penyajian LRA dalam instansi. Antara PSAP Nomor 02 dan LRA Kantor Camat Langowan Selatan, tidak memiliki perbedaan karena keduanya mengakui surplus/defisit saat pelaporan dilakukan dan bisa disimpulkan bahwa dalam penyajian Surplus/Defisit telah sesuai dengan PSAP Nomor 02.

Evaluasi perbandingan SiLPA/SiKPA (LRA) LRA Kantor Camat Langowan Selatan

Tabel 6. Perbandingan SiLPA/SiKPA (LRA) Kantor Camat Langowan Selatan dengan PSAP Nomor 02

Indikator	PSAP Nomor 02	LRA Kantor Camat Langowan Selatan	Keterangan
Penyajian SiLPA/SiKPA	PSAP No.02 selisih lebih/kurang realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA	Kantor Camat Langowan Selatan mencatat selisih penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA	Sesuai

Sumber: Data olahan, 2024

Tabel 6 menunjukkan penyajian SiLPA/SiKPA dalam PSAP Nomor 02 selisih lebih/kurang realisasi pendapatan laporan realisasi anggaran dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA, begitu juga dengan Kantor Camat Langowan Selatan mencatat selisih penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu

periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Ini menunjukan bahwa LRA instansi tersebut telah mengikuti standar PSAP Nomor 02 yang berlaku dengan baik.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Laporan Realisasi Anggaran maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengakuan pendapatan Laporan Realisasi Anggaran di Kantor Camat Langowan Selatan yaitu diakui pada saat diterima pada rekening kas umum Negara/Daerah. Hal ini berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
2. Pengukuran pendapatan Laporan Realisasi Anggaran di Kantor Camat Langowan Selatan berdasarkan azas bruto yaitu, dengan membukukan penerimaan bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jurnal netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) dari sumber pendapatan itu dilaksanakan oleh SKPD lain. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
3. Penyajian Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran di Kantor Camat Langowan Selatan komponen disajikan dalam mata uang rupiah dan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 02.
4. Pengakuan belanja Laporan Realisasi Anggaran di Kantor Camat Langowan Selatan yaitu menyediakan informasi komponen pengakuan belanja Laporan Realisasi Anggaran dan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 02.
5. Pengukuran belanja Laporan Realisasi Anggaran di Kantor Camat Langowan Selatan yaitu menyediakan informasi komponen pengukuran belanja LRA dan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 02.
6. Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran di Kantor Camat Langowan Selatan Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
Secara keseluruhan penyusunan laporan realisasi anggaran pada Kantor Camat Langowan Selatan telah dinilai baik dan sesuai dengan PSAP No 02 atas Laporan Realisasi Anggaran.

Daftar pustaka

- Anggraini, F. R., Haryono., & Yunita, K. (2023). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. *Jurnal Ekobistek*, 13(3), 113–119.
<https://doi.org/10.35134/ekobistek.v13i3.815>.
- Boja, A. W., S. Sopanah, A., & Puspitosarie, E. (2023). Analisis efektivitas dan penyajian PSAP No. 2 pada Dinas Sosial Kota Malang tahun 2020–2022. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 3(4), 845–854.
<https://doi.org/10.53625/jirk.v3i4.6548>
- Hasanah, N, & Fauzi, A. (2016). *Akuntansi pemerintahan*. In Media
- Kandioh, A. P., Morasa, J., & Mawikere, L. M. (2023). Evaluasi laporan realisasi anggaran belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 7(4), 431–438.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/52076>
- Majampoh, W. T., & Datu, C. (2021). Evaluasi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(3), 1731–1741.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/35961>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Nendher, J. C. T. (2022). Evaluasi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow.

Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 6 (1), 444-460.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/view/42370>

- Panggabean, E., Tinangon, J. J., & Wokas, H. R. N. (2025). Implementasi PSAP No. 2 dalam laporan realisasi anggaran di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3(1), 91–97.
<https://doi.org/10.58784/rapi.285>.
- Purnairawan, E., & Sastroatmodjo, S. (2021). Pengantar akuntansi. CV Media Sains Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Rindengan, A. M. T., & Kapojos, P. M. (2024). Evaluasi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi kasus pada Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon). *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 288–298.
<https://doi.org/10.58784/rapi.190>
- Siregar, B (2015). *Akuntansi sektor publik (Akuntansi keuangan pemerintah daerah berbasis akrual)*. UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. (2020) *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Pengantar akuntansi*. Pustaka Baru Press.
- Sumarsan, T. (2020). *Akuntansi dasar dan aplikasi dalam bisnis*. Versi IFRS. Jilid 1. PT. PT. Indeks.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Mitchell, J. E. (2021). *Accounting principles*. 14th Edition. John Wiley & Sons